

Implementasi PNPM Mandiri tahun 2007-2009 di kecamatan kedung waringin Kabupaten Bekasi

Yoza Erawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=133106&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami program penanganan kemiskinan PNPM Mandiri Pedesaan. Penelitian ini difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan hasil capaian program. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif (pemahaman, pandangan, dan tanggapan) para informan di lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran implementasi program di lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi.

Penelitian ini dilaksanakan pada program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, Dimana Kabupaten Bekasi terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang jumlahnya mencapai sebanyak 111.577 rumah tangga pada tahun 2005 dan sebanyak 105.338 rumah tangga (16%) dari 659.653 rumah tangga yang ada pada tahun 2008, sementara di Kecamatan Kedung Waringin dengan jumlah penduduk 55.737 jiwa, dan jumlah rumah tangga 38.570 pada tahun 2008, tercatat terdapat 6.638 rumah tangga miskin pada tahun 2005, dan pada tahun 2008 tercatat 5.589 RTM.

Tujuan dari penelitian ini : 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan, kegiatan-kegiatan dan pencapaian program penanganan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk memahami pencapaian pelaksanaan, serta aspek pendukung dan penghambat pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan, Program PNPM Mandiri Pedesaan telah menunjukkan kinerjanya awal implementasi program, dimana telah mampu melakukan pembangunan sejumlah prasarana desa melalui dana hibah program ditambah swadaya masyarakat setempat, menyalurkan dana kepada KSM, tetapi jika dicermati (setelah program menginjak tahun ketiga), dapat dinyatakan belum/tidak terjadi proses pemberdayaan (khususnya) bagi warga miskin, karena: (a) tidak terjadi transfer daya kepada warga miskin, sebab program lebih dimanfaatkan oleh kelompok yang mampu; (b) lembaga lokal masyarakat (UPK) lebih berperan sebagai penyalur kredit dari pada lembaga pemberdayaan. (c) partisipasi masyarakat pada kegiatan sarana prasarana terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan untuk tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang.;This study aims to understand poverty handling program PNPM Rural.

<hr>This study aims to understand poverty handling program PNPM Rural. This study focuses on aspects of planning, implementation, sustainability and the achievement of the program. The study was conducted through qualitative approaches (understanding, views, and responses) of informants in the field, which produces descriptive data, Data were obtained through in-depth interviews with the informants, along with documentation study, and observation.

This research was conducted on the program in the District of PNPM Rural Kedung Waringin Bekasi, Bekasi Where there are Poor Households (RTM) which amounts to as much as 111 577 households in 2005 and as many as 105 338 households (16%) of which there are 659 653 households in the year 2008, while in District Kedung Waringin with a population of 55 737 inhabitants, and the number of 38 570 households in

2008, noted there are 6638 poor households in 2005, and in 2008 recorded 5589 poor households.

The purpose of this study: 1. To know the process of implementation, activities and achievements of poverty handling program based on community empowerment. 2. To understand the achievement of implementation, as well as aspects of supporting and implementing the program PNPM Rural.

Results showed that, The program has shown PNPM Rural working at the beginning of the implementation of the program, which has been able to do the construction of village infrastructure through grants programs, to channel funds to the SHGs, and has been able to roll out several times, but if observed (after the program entering its third year), can be expressed not / do not occur empowerment process (especially) for the poor, because: (a) no transfer of power to the poor, for more programs that can be utilized by the group, (b) institutions local communities (UPK) has a bigger role as a supplier credit from the institution of empowerment. (C) community participation in infrastructure activity seen in the planning and execution of the program, while for the preservation and maintenance phase was decreased.